

**KAJIAN IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS *GOOD GOVERNANCE* DALAM
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DI DESA MUNDU, TULUNG, KLATEN**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

oleh:

ERWIN AGU DEFREJHON

A220130037

**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**KAJIAN IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS *GOOD GOVERNANCE* DALAM
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DI DESA, MUNDU, TULUNG, KLATEN**

PUBLIKASI ILMIAH

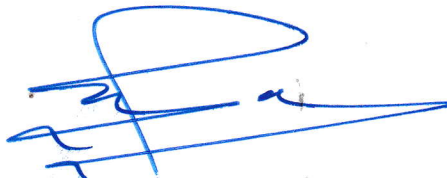
oleh:

ERWIN AGU DEFREJHON

A220130037

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sutan Syahrir Zabda', written over a horizontal line.

Drs. Sutan Syahrir Zabda, M.H

NIDK. 8812860018

PENGESAHAN

KAJIAN IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS *GOOD GOVERNANCE* DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA MUNDU, TULUNG, KLATEN

Oleh:

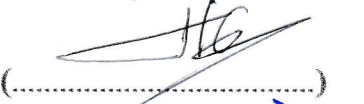
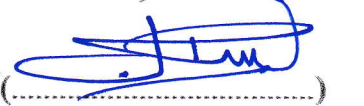
ERWIN AGU DEFREJHON

A220130037

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Surakarta Pada hari, tanggal: 7 Maret 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Drs. Sutan Syahrir Zabda, M.H
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dra. Sri Arfiah SH, M.Pd
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dra. Sundari S.H, M.Hum
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,



()
Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum

NIP. 19650428 199303 1001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Erwin Agu Defrejhon

NIM : A220130037

ProgamStudi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul Proposal Skripsi: **KAJIAN IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS GOOD GOVERNANCE DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA MUNDU, TULUNG, KLATEN**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa artikel publikasi yang saya serahkan ini benar-benar hasil karya saya sendiri dan bebas plagiat karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu/dikutip dalam naskah dan disebutkan pada daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini hasil plagiat, saya bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Surakarta, 7 Maret 2018

Yang membuat pernyataan,



Erwin Agu Defrejhon

A220130037

KAJIAN IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS *GOOD GOVERNANCE* DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA MUNDU, TULUNG, KLATEN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1). Kajian akuntabilitas *good governance* dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Mundu, 2). kendala dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, dan 3). Solusi yang diberikan. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Analisis data menggunakan model interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Kajian akuntabilitas *good governance* dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Mundu dapat dikaji melalui kebijakan yang telah diambil oleh kepala desa melalui pertimbangan BPD dan musyawarah antar warga melalui perwakilan, Pemerintah beserta lembaga Desa merumuskan program Pembangunan Desa melalui pembangunan yang sifatnya mendesak dan harus dilakukan dengan segera, Keberhasilan dalam suatu pembangunan di masyarakat seringkali di pengaruhi oleh seorang pemimpin, Program yang digunakan kepala Desa Mundu untuk membangun betonisasi dan jembatan dengan melalui padat karya, Pembangunan di masyarakat seringkali di pengaruhi oleh tipikal dari seorang pemimpin dan, pola kerja yang baik agar dapat dilaksanakan dengan optimal; 2). Kendala yang dialami, yaitu pertama kurangnya sumberdaya manusia, kedua Fasilitas yang kurang memadai, dan yang ketiga kurangnya pemahaman terhadap bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang legislasi; 3). Solusi yang diberikan pembinaan untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui seminar, BPD mengambil cara dengan memindahkan kegiatan rapat ke aula kantor desa, pembinaan anggota baru BPD dan kepala desa meminta kepada pemerintah daerah untuk mengadakan seminar untuk memberi pemahaman teknis serta legislasi agar sumber daya manusia yang berkompeten.

Kata kunci: Implementasi, akuntabilitas, pelaksanaan pembangunan, *good governance*,

ABSTRACT

This study aims to describe 1). Review of good governance accountability in planning and implementation of infrastructure development in Mundu Village, 2). constraints in the planning and implementation of infrastructure development, and 3). Solutions provided. This research uses descriptive qualitative. Data collection uses observation, interviews, and documentation. The validity of data using source triangulation and technique. Data analysis uses interactive models through data collection, data reduction, presentation and conclusion. The results showed that: 1). Assessment of good governance accountability in planning and implementation of infrastructure development in Mundu Village can be assessed through policies that have been taken by the village head through the consideration of BPD and deliberation among citizens through representatives, the Government and village institutions formulate village development programs through urgent development and should be done with soon, Success in a development in society is often influenced by a leader, a program used by Mundu village chief to build up concrete and bridge with labor intensive. Development in the community is often influenced by a typical leader and a good working pattern to implemented optimally; 2). Obstacles experienced, namely the first lack of human resources, the two facilities are less adequate, and the third lack of understanding of technical guidance from the Regional Government, especially in the field of legislation; 3). Solutions provided by coaching to improve human resources through seminars, BPD took the means by moving the activities of the meeting to the village office hall, the development of

new members of BPD and village head asked the local government to hold a seminar to provide technical understanding and legislali for competent human resources .

Keywords: *Implementation, accountability, development implementation, good governance,*

1. PENDAHULUAN

Desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desadan dibantu oleh perangkat desa pada saat melaksanakan tugas, kewajiban dan fungsinya. Pembangunan Desa menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pembangunan desa ialah bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Menurut Kartasasmita (2001 : 66) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Suparno (2001 : 46) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

Kewenangan dalam pembangunan desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Subyek pembangunan desa sendiri pada dasarnya terdiri dari 3 pihak, yaitu pertama, pemerintah desa dalam hal ini kepala desa serta perangkatnya, kedua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, dan ketiga adalah masyarakat desa itu sendiri. Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat desa adalah subyek hukum yang berperan dalam upaya pembangunan desa.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap pembangunan di desa mempunyai beberapa kewenangan demi kemajuan di desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Bukan mencari kesempatan di setiap celah untuk mencari keuntungan diri sendiri seperti kasus korupsi di madura.

Kasus ini berawal dari tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, dalam waktu dekat pemerintah akan mengumpulkan semua daerah untuk diberikan arahan soal pencegahan penyelewengan dana desa. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo juga mengaku terkejut dengan kasus yang terjadi di Pamekasan. "Baru-baru ini kita dikagetkan dengan kasus di Madura. Padahal, program dana desa kan tujuannya baik," kata Eko. Apalagi, pengawasan untuk mencegah penyelewengan dana desa sudah berlapis-lapis, tapi ternyata masih ada celah korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka setelah menggelar operasi tangkap tangan terkait dana desa di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Rabu 2 Agustus 2017. (Kompas.com).

Substansi perencanaan desa diantaranya menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah melahirkan semangat baru dalam pembangunan desa. Secara sederhana pembangunan desa memiliki tiga tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik tanpa ada suatu halangan yang berarti dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana akuntabilitas good governance dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Mundu, Tulung, Klaten.
- 2) Bagaimana kendala dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur berdasarkan prinsip Akuntabilitas Good Governancedi Desa Mundu, Tulung, Klaten.
- 3) Bagaimana solusi kendala dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur berdasarkan prinsip Akuntabilitas Good Governancedi Desa , Mundu, Tulung , Klaten.

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mendeskripsikan akuntabilitas good governance dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Mundu, Tulung, Klaten.
- 2) Untuk mendeskripsikan kendala dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur berbasis Akuntabilitas Good Governance di Desa Mundu, Tulung, Klaten
- 3) Untuk mendeskripsikan solusi kendala dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur berbasis Akuntabilitas Good Governancedi Desa , Mundu, Tuulung , Klaten.

2. METODE PENELITIAN

Tempat penelitian ini di Desa Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten Tahun 2017. Tahap dalam pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari tahap persiapan sampai dengan penulisan laporan penelitian. Secara keseluruhan semua kegiatan dilakukan selama kurang lebih empat bulan, yaitu sejak Oktober sampai dengan Januari 2018.

Menurut Sugiyono, (2010) Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek. Alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun penjelasan masing-masing metode tersebut sebagaimana uraian berikut ini.

1) Observasi

Menurut Arikunto (2010: 156), “observasi adalah kegiatan pengamatan secara langsung baik melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Menurut Kuswanto (2011), “observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian”. Jadi dalam suatu observasi seorang peneliti melihat situasi penelitian, fokus terhadap pengamatan dan ingatan. Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi secara luas tentang deskripsi Desa Mundu. Metode observasi ini digunakan untuk Mengkaji Implementasi Akuntabilitas Good Governance dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Mundu Tulung, Klaten.

2) Wawancara

Menurut Sugiyono (2014: 319-322), macam-macam wawancara dibedakan menjadi:

- a) Wawancara terstruktur (Structured Interview), yaitu suatu teknik pengumpulan data. Peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman wawancara maka pengumpul data dapat menggunakan alat bantu recorder, gambar, brosur, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.
- b) Wawancara semiterstruktur (Semistruktur Interview), pelaksanaan wawancara lebih bebas dibandingkan dengan jenis wawancara terstruktur karena bertujuan untuk

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dengan meminta pendapat dan ide-ide dari pihak yang diwawancarai.

- c) Wawancara tidak berstruktur (Unstructured Interview), merupakan wawancara yang bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap dalam pengumpulan datanya. Pedoman wawancara hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Jenis wawancara ini sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau untuk penelitian yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan tidak berstruktur. Wawancara tidak berstruktur digunakan dalam penelitian ini dikarenakan tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis untuk mengumpulkan datanya. Wawancara digunakan untuk mendapatkan data dari Desa Mundu mengenai kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur. Kegiatan wawancara tersebut disebut dengan wawancara bebas. Metode wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperkuat dan memperjelas data yang telah diperoleh dari metode observasi maupun dokumentasi yaitu data mengenai Kajian Implementasi Prinsip Akuntabilitas Good Governance dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Mundu, Tulung, Klaten.

3) Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2005: 82), dokumen merupakan suatu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Menurut Herdiansyah (2010: 143), studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu yang dibuat sendiri oleh subjek atau orang lain tentang subjek. Teknik mengkaji dokumen dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data mengenai Kajian Implementasi Prinsip Akuntabilitas Good Governance dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Mundu, Tulung, Klaten.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas *good governance* dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Mundu Ada dua alasan pokok mengapa program perlu disusun, yang pertama; Efisiensi komunitas untuk menjalankan fungsinya terkait dengan waktu yang dihabiskan untuk memikirkan bentuk implementasi kegiatan yang sesuai atau dibutuhkan menurut kapasitas

dan tujuan yang ingin dicapai. yang kedua; Efektifitas dalam menjalankan fungsi, peran dan sinkronisasi unit-unit organisasi atau komunitas terkait dengan rencana, distribusi tugas, model manajemen secara terpadu untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Ini sesuai dengan indikator kajian akuntabilitas *good governance* dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Mundu yaitu Manajerial pertanggungjawaban yang efektif dan efisien. Arah kebijakan pembangunan desa adalah hasil dari pengkajian secara komprehensif terhadap potensi dan masalah desa Mundu, Makna Kebijakan dan keputusan yang telah diambil itu sendiri ialah kebijakan yang telah diambil oleh kepala desa melalui pertimbangan BPD dan musyawarah antar warga melalui perwakilan. Hal ini sesuai dengan indikator kajian akuntabilitas *good governance* dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Mundu yaitu Kebijakan dan keputusan yang telah diambil. Pemerintah Desa beserta Lembaga Desa merumuskan program Pembangunan Desa, dalam hal ini menyusun Pembangunan apa yang sifatnya mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas. Hal ini sesuai dengan indikator kajian akuntabilitas *good governance* dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Mundu yaitu Program yang harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Keberhasilan dalam suatu pembangunan di masyarakat seringkali di pengaruhi oleh tipikal dari seorang pemimpin. Indikator selanjutnya yaitu Program yang akan dijalankan dapat berjalan dengan optimal. Program yang digunakan kepala Desa Mundu untuk membangun betonisasi dan jembatan dengan melalui padatkarya atau semua pembangunan dikerjakan oleh masyarakat secara gotong royong agar hasil yang didapat lebih optimal. Indikator selanjutnya adalah Orang yang berwenang dapat dipercaya dan berjalan dengan baik. Keberhasilan dalam suatu pembangunan di masyarakat seringkali di pengaruhi oleh tipikal dari seorang pemimpin. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan selalu di hubungkan dengan keaktifan aparatur pemerintah dalam proses pembangunan, dalam proses pembangunan keterlibatan aktif dari aparat pemerintah merupakan salah satu indikator penilaian masyarakat dalam suatu desa dengan menggunakan pola kerja yang baik agar dapat dilaksanakan denfgan optimal.

Kendala dalam implementasi akuntabilitas *good governance* dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Mundu yaitu terletak pada kurangnya sumberdaya manusia pejabat desa dan warga tentang proses perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur. Sehingga pengimplementasian akuntabilitas Good Governance dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Mundu dirasa masih kurang maksimal. Hambatan lainnya, yaitu Fasilitas yang kurang memadai, Gedung BPD nampak kurang perawatan serta ukurannnya yang terbilang sempit untuk menampung

kegiatan rapat. Kurangnya pemahaman terhadap bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang legislasi.

Solusi yang diberikan untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam proses implementasi akuntabilitas *good governance* dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Mundu dilakukan dengan cara pelatihan peningkatan sumber daya manusia melalui seminar sehingga kinerja dalam pelaksanaan fungsi legislasi menjadi meningkat, dengan peningkatan ini masyarakat pun akan meningkatkan kepercayaannya kepada kepala desa, kemudian solusi untuk fasilitas ruangan yang kurang memadai BPD mengambil cara dengan memindahkan kegiatan rapat ke aula kantor desa, sedangkan dalam hal pembinaan anggota baru BPD dan kepala desa meminta kepada pemerintah daerah untuk mengadakan seminar untuk memberi pemahaman teknis serta legislasi agar sumber daya manusia yang berkompeten.

4. PENUTUP

Akuntabilitas *good governance* dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Mundu Ada dua alasan pokok mengapa program perlu disusun, yang pertama; Efisiensi komunitas untuk menjalankan fungsinya terkait dengan waktu yang dihabiskan untuk memikirkan bentuk implementasi kegiatan yang sesuai atau dibutuhkan menurut kapasitas dan tujuan yang ingin dicapai. yang kedua; Efektifitas dalam menjalankan fungsi, peran dan sinkronisasi unit-unit organisasi atau komunitas terkait dengan rencana, distribusi tugas, model manajemen secara terpadu untuk mencapai tujuan yang telah disepakati

Kendala dalam implementasi akuntabilitas *good governance* dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Mundu yaitu terletak pada kurangnya sumberdaya manusia pejabat desa dan warga tentang proses perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur. Sehingga pengimplementasian akuntabilitas Good Governance dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Mundu dirasa masih kurang maksimal. Hambatan lainnya, yaitu Fasilitas yang kurang memadai, Gedung BPD nampak kurang perawatan serta ukurannya yang terbilang sempit untuk menampung kegiatan rapat. Kurangnya pemahaman terhadap bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang legislasi.

Solusi yang diberikan untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam proses implementasi akuntabilitas *good governance* dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Mundu dilakukan dengan cara pelatihan peningkatan sumber daya manusia melalui seminar sehingga kinerja dalam pelaksanaan fungsi legislasi menjadi meningkat, dengan peningkatan ini masyarakat pun akan meningkatkan kepercayaannya kepada

kepala desa, kemudian solusi untuk fasilitas ruangan yang kurang memadai BPD mengambil cara dengan memindahkan kegiatan rapat ke aula kantor desa, sedangkan dalam hal pembinaan anggota baru BPD dan kepala desa meminta kepada pemerintah daerah untuk mengadakan seminar untuk memberi pemahaman teknis serta legislasi agar sumber daya manusia yang berkompeten.

DAFTAR PUSTAKA

Undang – Undang No.6 Tahun 2014. *Tentang desa*. Jakarta : KEMENKU

Kartasmita, Ginandjar, 2001. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta : Pustaka CIDESINDO.

Kompas.com. (Komisi Pemberantasan Korupsi). Diakses pada tanggal 27 Desember 2017. Pukul: 20.15 WIB.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kuswanto, 2011, *Observasi (PengamatanLangsung Di Lapangan)*, [online], (<http://klikbelajar.com/umum/observasi-pengamatan-langsung-di-lapangan/>, Diakses tanggal 27 Desember 2017).

Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: alfabeta

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.